

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk merawat sumber daya dan potensi lokal dengan lebih baik, pengembangan lokal memerlukan audiens dan manajer regional yang bekerja bersama dengan pengembangan regional. Untuk memicu tumbuh kembang ekonomi serta terciptanya lapangan kerja baru di daerah tersebut, organisasi publik dan swasta harus bekerja sama. Pendapatan asli regional yang tinggi (PAD) yakni pemicu umum untuk kemajuan ekonomi yang tinggi, menyoroti pentingnya persyaratan otonom regional dalam memaksimalkan potensi lokal. Pendapatan yang diterima oleh area melalui perpajakan sesuai dengan undang -undang yang relevan disebut sebagai PAD. Dengan demikian, untuk memenuhi tugas mereka, pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup untuk menangani tuntutan regional sesuai dengan aturan yang relevan. Salah satu alasan mengapa otonomi regional penting untuk memaksimalkan keunggulan lokal yakni bahwa ia biasanya berjalan seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat, yakni pendapatan regional yang lebih besar (PAD).

Akumulasi modal pribadi dan otoritas yakni kekuatan pendorong di balik pembangunan ekonomi menurut teori ekonomi neoklasik. “Arsyad” (2018) menyatakan. Pengeluaran di tingkat regional memberikan wawasan tentang investasi nasional. Untuk kebutuhan yang mendesak dan jangka panjang, termasuk investasi dalam acara dan proyek lokal, pengeluaran lokal tersedia. Seperti yang dikatakan oleh Mangkoesoebroto pada tahun 2006. Pengeluaran investasi yakni subset dari pengeluaran kota yang mendukung kegiatan ekonomi publik dan bertujuan untuk meningkatkan aset dan properti lokal. Rute, penghubung, irigasi, komunikasi, dan bangunan yakni contoh dari infrastruktur umum yang akan mendapatkan biaya investasi yang berlaku, yang juga akan mencakup pengeluaran operasi yang diperlukan dan sukarela. (Regulasi No. 59 tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri). Keputusan No. 33 tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara otoritas dan badan otonom lokal diubah oleh undang -undang HKPD ini. Tujuan dari keputusan HKPD yakni

untuk memberikan pedoman yang baik yang dapat diikuti oleh pemerintah federal dan negara bagian untuk meningkatkan otonomi anggaran lokal dan menyediakan layanan publik yang lebih baik.

Ekonomi lokal, serta ekonomi masyarakat pada khususnya, mendapat manfaat dari peningkatan pengeluaran investasi. Keterlibatan sektor buruh sebagai aktor dalam kegiatan ekonomi dan perluasan kemungkinan pekerjaan sangat penting untuk ekonomi yang berkembang. Untuk mengakomodasi tenaga kerja yang besar sambil menjaga jumlah keseluruhan orang yang tidak bekerja seminimal mungkin, kegiatan ekonomi dipandang sebagai kejahatan yang diperlukan. "Irawan dan Sugaroko" (2017) mengklaim. Karena peningkatan mobilitas ekonomi, seluruh strategi penurunan gagal. Ini karena mobilitas ekonomi memberikan populasi dengan lebih banyak peluang dan pendapatan tenaga kerja. Penyakit ini memiliki potensi guna meresidu kemiskinan dalam jangka panjang. Seperti yang dinyatakan oleh Kuncoro pada tahun 2019.

Pemerintah federal telah memberi pemerintah daerah kekuatan untuk membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan dari tingkat federal, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai "otonomi lokal" (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Hukum 22 dan 25 tahun 1999 dan UU 32 tahun 2004 mengubah dan mengklarifikasi peraturan yang mengatur pelaksanaan otonomi kota. Sebagai hasil dari peningkatan kontrol lokal, pemerintah daerah harus lebih siap untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki dan memberikan pengawasan yang lebih baik (Handra dan Maryati, 2009).

Di Indonesia, desentralisasi fiskal dilakukan sesuai dengan dua undang - undang: Hukum Nomor 22 tahun 1999, yang berurusan dengan pemerintah daerah dan kemudian direvisi menjadi hukum nomor 23 tahun 2014, dan hukum nomor 25 tahun 1999, yang berurusan dengan keseimbangan keuangan antara Pusat dan Kabupaten dan kemudian direvisi ke dalam hukum nomor 33 tahun 2004. Devolusi Substansial, dengan mudah, dan dapat direvisi ke dalam undang - undang 33 tahun 2004. Devolusi dari substansial, dengan mudah. Ini berada dalam bidang pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area dengan potensi yang belum

dimanfaatkan dan menetapkan prioritas pembangunan yang memperhitungkan kualitas dan keadaan unik dari masing -masing bidang.

Secara khusus, implementasi pendapatan lokal dan anggaran pengeluaran sesuai dengan hukum nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah berdampak pada provinsi Jambi sebagai akibat dari prinsip -prinsip otonomi lokal. Dengan mengesahkan undang -undang ini, pemerintah federal mendelegasikan kekuasaan penuh ke beberapa daerah provinsi, distrik, dan kota untuk mengawasi dan mengendalikan masalah domestik hanya dengan sedikit pengawasan dari pemerintah federal.

ketika berpikir tentang ekonomi suatu negara, faktor yang termasuk pada aspek yang penting dipertimbangkan adalah laju pertumbuhannya. Memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam analisis ekonomi makro dilakukan dengan melacak pengembangan penerimaannya yang sebenarnya. Di antara negara -negara yang gigih dalam mengejar perkembangan yang lebih baik, Indonesia membuat langkah khususnya di bidang ekonomi.

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2019-2023(Persen)

Tahun	Pertumbuhan ekonomi (%)
2019	4,35
2020	-0,51
2021	3,70
2022	5,12
2023	4,66
Rata – rata	3,464

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Menurut Tabel 1.1 Jambi yakni provinsi di Sumatra, Indonesia, di mana ekonomi provinsi telah tumbuh pada tingkat yang lebih lambat daripada rata -rata nasional selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pembangunan ekonomi provinsi terpukul karena dampak pandemi Covid-19 pada sektor provinsi, tetapi segalanya mulai muncul pada tahun 2021. Dari 2019 hingga 2023, ekonomi tumbuh rata-rata 3.464 persen.

Menurut Subandi (2008), istilah "pembangunan lokal" mengacu pada upaya terkoordinasi oleh masyarakat dan pemerintah masing -masing untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya serta peluang yang ada, memalsukan kemitraan dengan bisnis untuk memberikan peluang kerja baru, dan meningkatkan ekonomi regional. High Regional Original Income (PAD) yakni sumber umum ekspansi ekonomi yang cepat, menyoroti pentingnya otonomi regional dalam mewujudkan potensi penuh masing -masing wilayah. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode 2019-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyar / Rp)
2019	1.651.689.944
2020	1.535.183.487
2021	1.535.183.487
2022	2.163.585.920
2023	1.900.664.254
Rata – Rata	1.757.261.418

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jambi 2025

Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan asli provinsi Jambi tidak stabil selama lima tahun terakhir, dengan puncak 20,08% pada tahun 2022 dan penurunan -7,02 pada tahun 2020 karena dampak Covid -19. Pendapatan asli daerah rata -rata selama lima tahun terakhir yakni 3,59%.

Pengangguran yakni indikator yang menghambat kemajuan ekonomi. Ketika orang - orang yang biasanya dipekerjakan tidak dapat menemukan pekerjaan yang menguntungkan, ini dikenal sebagai pengangguran (Sukirano, 2012). Sebagai akibat dari SDM yang terbuang, output terhambat, dan berkurangnya pendapatan, ketidakaktifan sering menjadi masalah bagi perekonomian. Munculnya masalah sosial baru dan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan yakni contoh dari efek jangka panjang.

Tingkat pengangguran yakni salah satu faktor yang dapat memperlambat perekonomian. Kegagalan untuk mengatasi pengangguran dapat menyebabkan kerentanan sosial dan kemiskinan, menurut Arsyad (2015). Setiap bangsa di dunia berurusan dengan pengangguran sampai batas tertentu. Seluruh negara berupaya untuk menjaga kondisi penganggurannya pada tingkat yang berkelanjutan karena tingkat tinggi mungkin mengganggu stabilitas nasional.

Koneksi antara upah dan tingkat tenaga kerja yakni komponen kunci dari analisis ekonomi makro, yang menempatkan masalah pengangguran dalam konteks pasar tenaga kerja.

Di bawah ini yakni tabel yang menggambarkan tingkat pengangguran di provinsi Jambi untuk tahun 2019-2023.

Tabel 1. 3 Jumlah Pengangguran Di Provinsi Jambi Periode 2019-2023

Tahun	Pengangguran(jiwa)
2019	73.965
2020	93.990
2021	93.754
2022	86.459
2023	85.576
Rata-rata	86.749

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Di lihat dari tabel 1.3 menampilkan persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi sejak 5 tahun terakhir mengalami pasang surut, dimana jumlah pengangguran provinsi jambi mengalami perkembangan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 22,43 % akibat dari pandemic covid 19 dan terendah terjadi ditahun 2021 sebesar -0,78% dengan rata – rata tingkat pengangguran terbuka sejak 5 tahun terakhir yaitu sebesar 3,814 %.

Kemiskinan yakni kondisi ketika seseorang atau suatu kelompok tidak mempunyai kemampuan ekonomi dalam meraih kriteria hidup yang secara umum diharapkan dalam kelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut tercermin dari pendapatan rendah yang tidak mencukupi pemenuhan keperluan pokok seperti makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Keterbatasan pendapatan tersebut mengakibatkan pula kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Identifikasi kemiskinan dalam masyarakat dilakukan dengan membandingkan kemampuan pendapatan dengan standar hidup yang dianggap layak. Secara prinsip, standar hidup dinilai bukan dari kebutuhan pangan saja, namun termasuk pula kesehatan serta pendidikan. Oleh karena itu, layaknya tempat tinggal termasuk bagian dari kriteria hidup atau kesejahteraan suatu masyarakat. Dengan demikian, suatu individu atau kelompok dikatakan dalam kriteria miskin apabila pendapatan yang mereka terima rendah yakni di bawah rata-rata dan berkesempatan rendah dalam menaikkan tingkat kesejahteraan mereka.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata memiliki efek yang merugikan pada pembangunan karena memperluas perbedaan pendapatan di dalam dan di seluruh wilayah, yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan (Harahap, 2006). Metode studi pembangunan saat ini tidak hanya nol pada penyebab kemiskinan, tetapi juga mulai membuat katalog semua kemungkinan penyebab kemiskinan. Tabel yang memproyeksikan tingkat kemiskinan dari 2019-2023, seperti yang terlihat di bawah ini:

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi 2019-2023 (jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2019	274.320
2020	277.800
2021	293.860
2022	279.370
2023	280.680
Rata-Rata	281.206

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Di lihat Tabel 1.4 untuk rincian tingkat kemiskinan di provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir, khususnya dari 2019 hingga 2023. Tingkat kemiskinan di provinsi Jambi bervariasi dari tahun ke tahun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 0,52%.

Meningkatkan aset regional dan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat yakni tujuan pengeluaran modal, yang ialah komponen pengeluaran langsung dalam anggaran regional. Pengembangan infrastruktur publik, termasuk jalan, jembatan, irigasi, telekomunikasi, dan bangunan lainnya, yakni tujuan utama dari pengeluaran modal ini, yang didanai melalui alokasi dana untuk urusan wajib dan opsi yang sesuai dengan peraturan yang ditingkatkan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 59.

Investasi pemerintah daerah sangat terkait dengan komponen pengeluaran modal. Meningkatkan produktivitas ekonomi sebagian besar tergantung pada mengalokasikan lebih banyak dana untuk aset tetap, seperti infrastruktur dan mesin baru. Kegiatan ekonomi lokal akan didorong oleh penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur yang memadai. Sebaliknya, pendapatan asli regional (PAD) dan kesejahteraan masyarakat diantisipasi untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan investasi yang lebih besar yang didorong dengan meningkatkan

pengeluaran modal, terutama untuk proyek infrastruktur. Tabel 1.5 menampilkan belanja modal untuk wilayah Jambi dari 2019 hingga 2023.

Tabel 1. 5 Belanja Modal Di Wilayah Jambi Periode 2019-2023)

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Milyar/Rp)
2019	866.500.806
2020	642.696.111
2021	449.690.684
2022	906.797.776
2023	1.039.531.000
Rata – rata	781.043.275

Sumber: BPS Dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025

Dana yang tercantum dalam Kolom 1.5 Anggaran untuk Wilayah Jambi berkisar dari 449.690.684 pada tahun 2021 hingga 1.039.531.000 pada tahun 2023, dengan pengembangan 13,70 menjadi yang tertinggi dan 30,03 menjadi yang terendah. Selama lima tahun terakhir, provinsi Jambi telah menginvestasikan rata -rata 781.043,275 pada proyek -proyek modal, tumbuh pada tingkat 14,158%.

Sejauh mana suatu wilayah dapat mengimplementasikan kebijakan secara mandiri tergantung pada ukuran pendapatan asli regional (PAD). Ketergantungan yang lebih rendah pada pemerintah federal dikaitkan dengan pad yang lebih tinggi karena peningkatan kemampuan lokal. Pemerintah daerah harus lebih berhati -hati saat menangani pajak dan pungutan regional untuk meningkatkan pad ketika desentralisasi atau otonomi regional berperan, seperti yang ditunjukkan oleh fenomena ini. Pengesahan otonomi regional pemerintah federal telah membuka beberapa pintu untuk peraturan dan kota untuk memainkan peran yang lebih besar dan meningkatkan kapasitas mereka dalam pembangunan regional. Penciptaan pola untuk pertumbuhan ekonomi regional sangat penting untuk pengelolaan sumber daya lokal, seperti halnya optimalisasi potensi ekonomi lewat pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta sektor kritis.

Salah satu mekanisme guna mencegah terjadinya kesenjangan sosial antar wilayah yakni melalui kebijakan transfer dana ke daerah. Proses implementasi kebijakan ini mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kesenjangan sosial fiskal antara otoritas pusat dan lokal, antar lokal itu sendiri, alokasi tanggung jawab pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota, serta perbedaan kualitas dan pelayanan publik di antara daerah. Selain itu, hal ini juga mencakup upaya pengembangan potensi ekonomi setempat, efisiensi dalam penggunaan sumber daya nasional, penyelarasan perencanaan pembangunan antara tingkat nasional dan daerah, serta percepatan pembangunan di wilayah yang tertinggal, terluar, terdepan, dan pasca konflik. Menurut Simanjuntak dalam penelitian oleh Sidik et al. (2002), tujuan utama dari kebijakan transfer dana ke daerah yakni guna mencegah terjadinya kesenjangan sosial antar wilayah dan memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di seluruh wilayah.

Pengaliran dana transfer ke pemerintah daerah harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat yang diakomodasi. Meningkatnya kualitas layanan publik juga diharapkan mampu menarik minat investor untuk berbisnis di wilayah tersebut. Upaya ini dapat direalisasikan melalui langkah-langkah pemerintah yang memberikan insentif investasi. Namun, sebagai konsekuensi, pemerintah perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk tujuan tersebut. Saat ini, terdapat kecenderungan di mana beban belanja rutin pemerintah daerah semakin meningkat, sementara kemampuan mereka untuk membangun infrastruktur semakin terbatas.

Dalam paparan latar belakang diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi. Sehingga penulis memilih judul **Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi Melalui Variabel Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jambi Tahun 2000-2023.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Pengangguran , Jumlah Penduduk Miskin, belanja modal Terhadap pertumbuhan ekonomi Di Provinsi Jambi Tahun 2000- 2023.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Pengangguran , Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pendapatan asli daerah, jumlah pengangguran, dan jumlah penduduk miskin terhadap belanja modal di provinsi jambi tahun 2000-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pendapatan asli daerah, jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin , dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi tahun 2000-2023.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal sebagai variabel intervening di provinsi jambi tahun 2000-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca maupun pihak-pihak yang ingin menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, dengan fokus khusus pada peran belanja modal sebagai variabel intervening.

b. Manfaat praktisi

Diharapkan hasil ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan instansi terkait, dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendorong peningkatan kualitas layanan publik serta mendorong kemajuan wilayah. Diharapkan pula bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa kajian atau referensi guna penelitian lebih lanjut.